

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alvi Syahrin, Martono Aggusti, dan Abdul Azis Alsa. 2023. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar: Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan Ke-1. Medan; CV. Merdeka Kreasi Group.
- Dalhan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Yogyakarta; Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Duwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru; Hawa dan Ahwa.
- Edi Yunara. 2018. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.
- Galang Taufani Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok; Raja Grafindo Persada.
- Imam Jalaludin Rifa'i. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Serang Banten; PT Sada Kurnia Pustaka.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Kedua. Jakarta; Kencana.
- Kristian. 2018. *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syarifuddin. 2020. *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Edisi Pertama. Jakarta; Kencana.
- M. Yasir Said, Ifrani, Editor Yati Nurhayati. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan sebagai Premium Remedium*. Bandung; Nusa Media
- Muhammad Natsir. 2019. *Korporasi Antar Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh*. Yogyakarta; Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).



Adnan Rafi Al-Farizy, et al.. 2021. *LPI dalam Lingkaran Pertanggungjawaban Kerugian Negara*. Yogyakarta; CV Bintang Gemesta Media.

- Muhammad Sadi Is. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta; Kencana.
- Muhammad Syahrin. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher.
- Muntaha. 2018. *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta; Kencana.
- Novita Erdianti. 2019. *Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. Malang; Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Padian Adi Selamat Siregar. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Sah*. Yogyakarta; Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Parningotan Malau. 2022. *Corporate Crime Kecelakaan Di Tempat Kerja*. Sidoarjo; Zifatama Jawa.
- Ramiyanto. 2019. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Ratri Novita Erdianti. 2019. *Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. Malang; Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Rinto Wardana. 2016. *Tanggungjawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*. Malang; Media Nusa Creative.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Christianto. 2018. *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya; PT Revka Petra Media.
- T. Mangaranap Sirait. 2021. *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*. Yogyakarta; Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- 2022. *Hukum Pidana Korporasi dan Sistematis Penegakkan secara Integral*. Yogyakarta; Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Wisnu Murtopo Nur Muhammad dan Fadli Alfarisi. 2023. *Rekonstruksi Kewenangan Penuntutan Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang Berbasis Nilai Keadilan*. Indramayu; CV. Adanu Abimata.
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum erusahaan Edisi Pertama*, Jakarta; Kencana.



Skripsi:

Yusril Firdaus. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rindu Deswita Haryono. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah (Analisis Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN.Unh)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Jurnal:

Indra Rahayu. 2023. *Kejahatan Korporasi Terhadap Masyarakat dan Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.1 No.02, Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia, Bandung.

Marthen B. Salinding. 2019. *Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat (The Principle of Coal and Mineral Mining Law Sided With Indigenous People)*. Jurnal Konstitusi, Volumen 16, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tarakan.

Muhamad Soni Wijaya, Masruchin Ruba'l, dan Imam Koeswahyono. 2018. *Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Rechtidee, Vol.13, No.1, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Nedi Gunawan Situmorang. 2020. *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2020*. Palar (Pakuan Law Review) Volumen 6 Nomor 02, Magister Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat.

Neni Vesna Madjid dan Mekky Putra. 2023. *Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan*. Unes Law Review, Vol. 5 Issue 4, LPPH Universitas Ekasakti, Padang.

ovita Erdianti. 2015. *Urgensi Pidana Terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.13 No.1, Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang.



Suriadi Muslomoan. *et.al.* 2023. *Pemahaman Konsep Kejahatan Korporasi dalam Perkembangan Hukum Pidana (Understanding Deep Corporate Crime Development of Criminal Law)*. Journal Sultra Research of Law, Vol.5 No.1, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 33).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790, Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 33).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 68).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 68).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 59).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 32).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 65).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106,



Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 82).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 229).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 67).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 121).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6635).

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5795, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 11).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 32).

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597, Lembaran Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 22).

in Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Korporasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119).

Sumber Internet:

Ahmad Akbar Fua. Liputan6.com Kendari. *Rusak Ratusan Hektare Hutan Lindung, Dishut Kejar Penambang Liar di Konawe Utara*. <<https://www.liputan6.com/regional/read/5027935/rusak-ratusan-hektare-hutan-lindung-dishut-kejar-penambangan-liar-di-konawe-utara>>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2023 Pukul 10.15 WITA.

Ahmad Arif. Kompas.Id. *Indonesia Sumbang 58,2 Persen Perusakan Hutan Tropis akibat Pertambangan*. <<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/09/13/indonesia-sumbang-582-persen-perusakan-hutan-tropis-akibat-pertambangan>>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 Pukul 20.15 WITA.

Demis Rizky Gosta. CNBC Indonesia. *Soal Babat Hutan untuk Tambang, Indonesia Juara Satu*. <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220915073100-37-372195/soal-babat-hutan-untuk-tambang-indonesia-juara-satu>>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 Pukul 21.55 WITA.

Tautan Direktori Putusan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/Pid.Sus-LH/2021, Tanggal 15 September 2021. <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed01ad5f8c17c8a4d9313333393236.html>>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 18.20 WITA.

Tautan Direktori Putusan. Putusan PN Unaaha Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh, Tanggal 9 September 2020. <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/15894a6p67967675e10d3bf7f7ebf99.html>>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 17.45 WITA.

